

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Program Studi Akuntansi Syariah**



Oleh :

SITI KHODIJAH

NIM. 1505046069

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Siti Khodijah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Siti Khodijah

Nomor Induk Mahasiswa : 1505046069

Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Agustus 2019

Pembimbing I



H. Johan Arifin, S.Ag., MM
NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing II



Arif Afendi, SE., M. Sc
NIP. 19850526 201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id - Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : **Siti Khodijah**
NIM : 1505046069
Judul : **Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta**
Telah diujikan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Waliosongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Baik, pada tanggal :

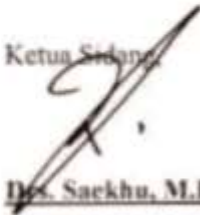
16 September 2019

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Program Studi Akuntansi Syariah tahun akademik 2019/2020.

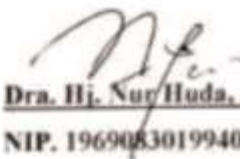
Semarang, 16 September

Mengetahui,

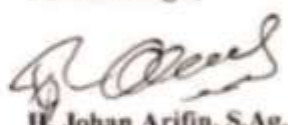
Ketua Sidang,


Drs. Saekhu, M.H.
NIP. 196901201994031004

Penguji I,


Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196903301994032003


Pembimbing I,


H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.
NIP. 197109082002121001

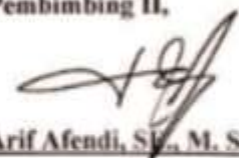
Sekretaris Sidang,


H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.
NIP. 197109082002121001

Penguji II,


Prof. Dr. Hj. Siti Mujihatun, M.Ag.
NIP. 195904131987032001

Pembimbing II,


Arif Afendi, S.P., M. Sc.
NIP. 198505262015031002



MOTTO

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah.

Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Q.S al-Baqarah 2 : 195

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku bapak Masduki dan Ibu Lasmiatun, yang selalu menguatkanmu, merawatmu, memotivasiku dan mendoakan untuk keberhasilanku. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Adikku tersayang Muhammad Nyipto Aqila Azka, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat, nenekku tercinta Gami yang senantiasa menasehati dan mendoakanku, serta keluarga besar (Alm) Mustajab berkat doa dan dukungan baik moril dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Segenap keluarga besar Akuntansi Syariah 2015, yang telah memberikan semangat dan doa.
4. Almamaterku tercinta UIN Walisongo Semarang.

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Agustus 2019

Deklarator,

SITI KHODIJAH

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987. Berikut penjelasan pedoman tersebut:

1. Kata Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arabnya yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي-يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و-وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang (maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah dan ya'	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t)

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الاطفال : raudah al-attfāl

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi

ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْنَ: zayyana

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf al namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (1) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

سَيِّئٌ : syai'un

7. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aūfu al-kaila wa al-mîzāna

8. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : wa mā Muhammadun illā rasuul

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamî'an

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- Swt = *subhanallahu wata'ala*
Saw = *sallallahu 'alaihi wasallam*
a.s = *'alaihi al-sallam*
H = Hijriah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
QS = Qur'an Surat
HR = Hadits Riwayat

ABSTRACT

Increasing regional revenue can be done by optimizing the potential that exists in the region, one of which is tourism potential through tax and non-tax revenue. The success of the development of the tourism sector, will increase its role in regional revenue by taking into account the factors that influence it, such as the number of tourist visits both domestic and foreign tourists, per capita income, and hotel occupancy rates. Every tourism trip will benefit the economy of a region and will certainly have an impact on increasing Regional Original Revenue.

This study aims to analyze the factors that influence regional revenues from the tourism sector in the Special Province of Yogyakarta. This study uses multiple linear regression analysis with program Eviews with regional revenue in the tourism sector as the dependent variable and three independent variables namely the number of tourists, per capita income, and occupancy rates of hotels.

The results of statistical tests show that the data are normally distributed and free from deviations. Based on the results of the data Eviews, it shows that the three variables in the number of tourists, per capita income, and the occupancy rate of the hotel together influence the regional income of the Tourism Sector in the Special Region of Yogyakarta. Partially variable the number of tourists and per capita income has a positive and significant effect on regional revenue in the tourism sector. While the variable occupancy rate of the hotel has a negative and not significant effect on the regional revenue of the tourism sector in the Special Region of Yogyakarta.

Keywords: PAD, Special Region of Yogyakarta, Tourism Sector

ABSTRAK

Peningkatan penerimaan daerah dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah salah satunya potensi pariwisata melalui penerimaan pajak dan bukan pajak. Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata, akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti, jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, pendapatan perkapita, dan tingkat hunian hotel. Setiap perjalanan pariwisata akan menguntungkan bagi perekonomian dari suatu daerah dan tentunya akan berimbas pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program *eviews* dengan penerimaan daerah sektor pariwisata sebagai variabel dependen dan tiga variabel independen yaitu jumlah wisatawan, pendapatan perkapita, dan tingkat hunian hotel.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan bebas dari penyimpangan. Berdasarkan hasil olah data *eviews* menunjukkan bahwa ketiga variabel jumlah wisatawan, pendapatan perkapita, dan tingkat hunian hotel secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara parsial variabel jumlah wisatawan dan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata. Sedangkan variabel tingkat hunian hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci : PAD, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sektor Pariwisata

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'aalamiin

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta". Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan, namun berkat doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si. Kepala Jurusan Akuntansi Syariah, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. H. Johan Arifin, S.Ag., M.M. dan Arif Afendi, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi dan saran selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Dr. Ali Murtadho, M.Ag. selaku dosen wali atas segala saran dan nasihat selama penulis menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuann dan nasihat yang bermanfaat bagi penulis.

7. Dinas Pariwisata DIY dan Badan Pusat Statistik DIY yang telah bersedia memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.
8. Bapak, Ibu dan adikku yang telah memberikan dukungan moral, untaian doa, pendapat, dan motivasi yang tiada henti serta pengorbanan yang sangat besar demi keberhasilan penulis.
9. Keluarga besar Akuntansi Syariah 2015 khususnya AKSB 2015 yang telah memberikan semangat, saran, bantuan dan doa kepada penulis.
10. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blora yang telah memberikan motivasi, dukungan dan doa serta pengalaman berharga bagi penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia dan lindungan-Nya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa-doanya kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan segenap ketulusan hati, penulis mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Semarang, 13 Agustus 2019

Penulis,

Siti Khodijah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN DAN SINGKATAN	vii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Pendapatan Asli Daerah	13
2.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah.....	13
2.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah	14

2.1.3	Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam	19
2.2	Pariwisata	24
2.3	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata	26
2.4	Penelitian Terdahulu.....	29
2.5	Pengembangan Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN.....		33
3.1	Jenis dan Sumber Data	33
3.2	Populasi dan Sampel	33
3.3	Metode Pengumpulan Data	33
3.4	Variabel Penelitian dan Pengukuran	34
3.5	Definisi Operasional	35
3.6	Teknik Analisis Data	36
3.7	Uji Asumsi Klasik.....	37
3.7.1	<i>Uji Multikoloniaritas</i>	37
3.7.2	<i>Uji Autokorelasi.....</i>	38
3.7.3	<i>Uji Heteroskedastisitas</i>	39
3.7.4	<i>Uji Normalitas</i>	39
3.8	Analisa Model Regresi	41
3.8.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	41
3.8.2	Uji t-Statistik	42
3.8.3	Uji Variansi/Uji F-statistik	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	43
4.1.1	Kondisi Geografis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	43
4.1.2	Kondisi Topografi	44
4.1.3	Pertumbuhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	45
4.1.4	Potensi Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	46

4.2	Perkembangan Kegiatan Pariwisata di Provinsi DIY	48
4.2.1.	Penerimaan Daerah.....	48
4.3	Deskripsi Variabel.....	50
4.3.1	Jumlah Wisatawan.....	50
4.3.2	Tingkat Hunian Hotel	52
4.3.3	Pendapatan Perkapita.....	54
4.4	Analisis dan Pembahasan	55
4.4.1	Analisis Deskriptif.....	55
4.4.2	Uji Asumsi Klasik	56
4.4.3	Pengujian Hipotesis dan Persamaan Regresi	60
4.4.4	Pembahasan.....	64
BAB V PENUTUP.....		70
5.1	KESIMPULAN.....	70
5.2	SARAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA		1
LAMPIRAN A.....		5

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Objek Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta	6
Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Pada Daya Tarik Wisata DIY	6
Tabel 1.3 PAD Sektor Pariwisata DIY	7
Tabel 4.1 DIY secara Administratif	43
Tabel 4.2 PDRB provinsi DIY atas Harga Konstan	45
Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Wisnus dan Wisman DIY	47
Tabel 4.4 Rincian Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata DIY	48
Tabel 4.5 Penerimaan Sektor Pariwisata DIY	49
Tabel 4.6 Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke DIY	51
Tabel 4.7 Tingkat Hunian Hotel Berbintang dan Hotel Melati DIY	53
Tabel 4.8 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan DIY	54
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolonieritas	56
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi	57
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	58
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas	58
Tabel 4.13 Hasil Estimasi Output Regresi	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A (Data Mentah)

Lampiran B (Data Variabel penelitian)

Lampiran C (Hasil Output Pengolahan Data)

- a. Hasil Output Regresi
- b. Hasil Output Multikolonieritas
- c. Hasil Output Autokorelasi
- d. Hasil Output Heteroskedastisitas
- e. Hasil Output Normalitas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan suatu bangsa didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.¹ Upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang seimbang antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah melalui otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.² Pemberian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat mencegah berbagai bentuk ketimpangan pembangunan yang berlanjut antara satu daerah dengan daerah lainnya. Selain itu otonomi daerah diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan tercapainya efisiensi kinerja perekonomian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah semakin memperjelas kedudukan dan fungsi Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan

¹ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2010, h. 22

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 6

tugas pembantuan.³ Perubahan peta pengelolaan fiskal atau yang sering disebut dengan desentralisasi fiskal yang bergerak dari pusat ke daerah didukung bahwa daerah akan mempunyai fleksibilitas yang cukup tinggi dalam pemanfaatan sumber-sumber utama pembiayaan daerah tersebut.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.⁴

Konsekuensi adanya otonomi daerah yaitu tidak adanya dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam segala faktor pembangunan daerah seperti menentukan jumlah dan alokasi dana. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang independen, misalnya pajak daerah dan retribusi daerah. Jika pemerintah daerah mampu menggali potensi daerah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar, maka semakin baik pula dalam menentukan perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), perimbangan keuangan, dan pendapatan lain yang sah menurut undang-undang. Besar kecilnya jumlah dana yang diperlukan pemerintah daerah untuk pelayanan publik sangat bergantung pada luas wilayah, keadaan geografis, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kompleksitas kebutuhan penduduk serta hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sosial ekonomi daerah tersebut.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 3

⁴ M. Makhfudz, *Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, hal. 381.

Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan dari kemandirian sebuah daerah karena menjadi hal paling penting dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Yani Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil daerah lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.⁵ Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan mengoptimalkan potensi yang ada pada daerah tersebut. Sebagai contoh memaksimalkan potensi alam yang dimiliki sebuah daerah untuk dikelola menjadi destinasi pariwisata yang menarik.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Berdasarkan data tahun 2017, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 14.04 juta atau naik 21.88 persen dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 11.52 juta kunjungan.⁶ Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa provinsi yang paling sering dikunjungi oleh para turis adalah Bali sekitar lebih dari 3,7 juta disusul DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara,

⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009, h. 59

⁶<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/01/1468/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-desember-2017-mencapai-1-15-juta-kunjungan--.html> diakses pada Minggu, 3 Maret 2019 pukul 19.46 WIB

Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Banten dan Sumatera Barat.⁷

Industri pariwisata di Indonesia memberikan sumbangan besar untuk devisa negara. Hal ini didukung dengan semakin banyaknya destinasi wisata di daerah-daerah se-Indonesia. Dengan adanya pariwisata, akan memberikan dampak positif bagi lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Dari sisi ekonomi, dengan adanya pariwisata akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Selain itu permintaan akan transportasi umum juga akan meningkat.

Dalam perkembangannya, industri pariwisata selalu melakukan peningkatan dan memunculkan sesuatu yang baru. Saat ini, wisata syariah merupakan suatu tren baru dalam dunia pariwisata. Indonesia dikenal luas di dunia sebagai wisata halal terbaik atas kemenangannya dalam event “*The World Halal Travel Summit & Exhibition 2015*”. Dalam even ini, Indonesia berhasil mendapatkan tiga penghargaan sekaligus, meliputi; *World Best Family Friendly Hotel*, *World Best Halal Honeymoon Destination* dan *World Best Halal Tourism Destination*.⁸ Hal ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk melakukan pengembangan wisata syariah dan industri jasa syariah, sehingga wisata syariah identik dengann Indonesia dalam mindset wisata dunia.

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata, akan meningkatkan perannya dalam perekonomian suatu negara berupa meningkatnya penerimaan daerah. Pengelolaan sektor pariwisata secara terpadu akan mampu menghasilkan pendapatan melebihi pendapatan dari sektor migas dan sektor lainnya. Penerimaan sektor pariwisata dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu; jumlah wisatawan baik domestik maupun manca negara, tingkat hunian hotel, dan pendapatan perkapita.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata_di_Indonesia diakses pada Minggu, 3 Maret 2019 pukul 19.50 WIB

⁸ <https://nasional.tempo.co/read/711534/world-halal-travel-award-2015-indonesia-raih-3-penghargaan> diakses pada Minggu, 3 Maret 2019 pukul 20.00 WIB

Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan luas wilayah sebesar 3.185,80 km² merupakan salah satu daerah yang memiliki sektor pariwisata strategis dan potensial untuk dikelola, dikembangkan dan dipasarkan. Terdapat beberapa potensi yang dapat dikembangkan baik wisata budaya atau sejarah, wisata alam, wisata bahari, dan wisata buatan yang tersebar diberbagai kabupaten dan kecamatan bahkan beberapa daerah wisatanya terkenal hingga mancanegara. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu dari 11 provinsi yang telah mengembangkan wisata syariah. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat fasilitas dan infrastruktur yang dapat mendukung perkembangan wisata syariah, antara lain; terdapat beberapa hotel yang telah menggunakan konsep wisata syariah, restoran halal, bank syariah, dan lainnya. Wisata syariah adalah wisata yang dilakukan untuk mengunjungi dan melihat kebesaran ciptaan Allah yang ada di bumi, sehingga kita dapat belajar lebih bersyukur dan memperbaiki kualitas iman dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadits.

Perintah untuk melakukan perjalanan juga telah dijelaskan dalam al-Qur'an salah satunya terdapat pada Q.S. Luqman : 31

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

Artinya :*“Tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur”*.⁹

Perkembangan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Buku Statistik Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 jumlah objek pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta terdata yang meliputi

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h. 414.

objek wisata alam, budaya, buatan, dan desa/kampung wisata adalah sebanyak 131 objek wisata.¹⁰

Tabel 1.1
Jumlah Objek Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Objek Wisata	Pertumbuhan
1	2013	265	-
2	2014	132	-50 %
3	2015	132	-
4	2016	127	-3,78 %
5	2017	131	3,15 %

Sumber : Buku Statistik Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2017

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keanekaragaman yang bisa menarik para wisatawan. Tidak hanya keindahan alam tetapi juga sejarah, kebudayaan, dan religinya. Dengan keanekaragaman yang dimiliki diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat sekitar bahkan hingga mancanegara. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara terhadap objek wisata di DIY mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daya Tarik Wisata DIY
Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pertumbuhan
1	2013	13.025.218	-
2	2014	16.861.319	29,45 %

¹⁰ Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, *Buku Statistik Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta 2017*.

3	2015	19.273.586	14,30 %
4	2016	21.445.343	11,26 %
5	2017	25.950.793	21,01 %

Sumber : Buku Statistik Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2017.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara cukup positif dilihat dari tahun ke tahun walaupun terjadi pertumbuhan yang fluktuatif. Terjadi pertumbuhan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 29,45 % yang berarti bahwa pada tahun ini menggambarkan kondisi perekonomian yang bagus dimana setiap perjalanan ke objek pariwisata akan menguntungkan sisi perekonomian dari daerah yang dikunjungi. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan PDRB daerah tersebut.

Tabel 1.3

PAD Sektor Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2013-2017

Tahun	PAD Sub Sektor Pariwisata	Prosentase Kenaikan
2013	188.839.015.344	-
2014	236.955.587.690	25.5%
2015	266.933.359.315	12.7%
2016	353.913.365.540	32.6%
2017	423.146.610.814	19.6%

Sumber : Buku Statistik Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2017

Dari tabel di atas dapat diketahui laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2013-2017 mengalami pertumbuhan yang kurang stabil. Hal ini dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada tahun 2014 menurun di tahun 2015 sebesar 12.8 % kemudian meningkat dengan signifikan

ditahun 2016 sebesar 19.9 %. Di tahun berikutnya terjadi penurunan kembali dari 32.6 % menjadi 19.6 %. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan dari sektor Pariwisata selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya, akan tetapi pertumbuhan pendapatannya masih lambat. Oleh karena itu perlu ditelaah apakah perkembangan cukup tinggi atau sebaliknya.

Ninie Puncasari (2016) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2010-2016)" menyimpulkan bahwa jumlah objek wisata dan jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah yang berarti bahwa semakin banyak objek wisata dan wisatawan yang berkunjung, maka prosentase pendapatan asli daerah sektor pariwisata DIY juga meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Habibie Alghifari (2018) dengan judul penelitian "Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat (Tahun 2013-2016)" menyatakan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013-2016 yang berarti bahwa semakin banyak wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang berkunjung, maka semakin tinggi prosentase pendapatan asli daerah yang diterima oleh provinsi Jawa Barat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Irma Mudzhalifah (2018) tentang "Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan, dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Penerimaan Sektor Pariwisata sebagai Variabel Moderating pada Dinas Pariwisata Kota Palembang" menyimpulkan bahwa ketiga variabel penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Ferry Pleanggra (2012) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan, dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Retribusi Objek Pariwisata 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah" menghasilkan kesimpulan bahwa ketiga variabel penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan retribusi objek pariwisata di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Dari latar belakang di atas, maka judul dalam penelitian ini adalah " **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2003-2017)**"

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah jumlah wisatawan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?
- b. Apakah pendapatan perkapita berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?
- c. Apakah tingkat hunian hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji apakah jumlah wisatawan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Menguji apakah pendapatan perkapita berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Menguji apakah jumlah hunian hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah menjadi tambahan referensi atau rujukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut yaitu:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pemahaman mengenai pendapatan asli daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah setempat dalam menentukan kebijakan yang tepat, guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini diuraikan tentang pengertian PAD, pariwisata, jenis pariwisata, aspek ekonomi pariwisata. Selain itu, akan dipaparkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya akan diuraikan

kerangka pemikiran sesuai dengan teori yang relevan dan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini mendeskripsikan tentang jenis dan sumber data, penentuan populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas secara rinci analisis data yang digunakan dalam penelitian. Bab ini akan menjawab permasalahan penelitian yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan teori yang relevan.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang hasil penelitian, simpulan dari penelitian, keterbatasan serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal khususnya melalui PAD. Menurut Mardiasmo pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹¹ Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki pemerintah daerah akan lebih tinggi. Peningkatan PAD akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat dioptimalkan dengan meningkatkan sektor-sektor seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor yang lain. Peningkatan PAD menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerahnya. Semakin tinggi PAD akan menambah dana pemerintah daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah menurut Halim adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan dari pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan menjadi

¹¹ Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Andi, 2004, hal. 132.

¹² Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2004, hal. 67.

dua, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan non pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan tanpa memperoleh imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Iuran ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pajak Daerah

Menurut UU No. 34 tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
5. Selain bertujuan budgeter, pajak juga memiliki tujuan mengatur.¹³

Menurut Nick Devas dari Ochio University dalam ukunya *Financing Local Government In Indonesia*, kriteria suatu pajak

¹³ Waluyo, Wirawan D.Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2002, hal.5.

daerah yang baik adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:¹⁴

1) Penghasilan

Dari segi penghasilan mencukupi untuk tujuan apa pajak tersebut dipungut; harus stabil dan dapat diprediksi; harus dapat mengantisipasi gejolak inflasi, pertumbuhan penduduk dan menimbulkan harapan-harapan; serta biaya untuk memungut harus proporsional dengan hasil yang diperoleh.

2) Keadilan

Dari segi keadilan, pajak daerah tersebut harus mencerminkan dasar pengenaan dan kewajiban bayar yang jelas dan tidak semena-mena; pajak harus adil secara horizontal dalam arti bahwa beban pajak harus sama atas wajib pajak yang mempunyai kemampuan ekonomi yang sama; pajak harus adil secara vertikal dalam arti bahwa wajib pajak dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi harus membayar pajak yang lebih tinggi pula dan secara geografi juga harus adil dalam arti bahwa tidak ada perbedaan pajak antara daerah-daerah yang memperoleh pelayanan yang sama dari pemerintah setempat.

3) Efisiensi

Dari segi efisiensi, pajak daerah tersebut harus mampu menimbulkan efisiensi dalam alokasi sumber-sumber ekonomi daerah; mencegah distorsi ekonomi; dan mencegah akses dari beban pajak terhadap perekonomian di daerah.

4) Implementasi

Pajak tersebut dapat diimplementasikan secara efektif baik dalam bidang politik maupun kapasitas administrasi.

¹⁴ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2010, hal. 102-103.

5) Sesuai dengan sumber pendapatan daerah

Harus ada kejelasan untuk daerah mana pajak tersebut diterapkan dan bagaimana cara pemungutannya guna mencegah usaha-usaha penghindaran pajak dari wajib pajak; objek pajak tidak mudah dialihkan dari satu daerah ke daerah lainnya; tidak boleh menyebabkan pengurasan sumber-sumber ekonomi daerah; tidak boleh dipaksakan untuk daerah-daerah yang kurang kapasitas administrasinya.

Pajak yang telah dihasilkan oleh pemerintah daerah digunakan sepenuhnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Seperti pajak pada umumnya, pajak daerah juga berperan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (berfungsi sebagai budgetair) dan sebagai alat pengatur perekonomian daerah (regulerend).

Menurut Sari pajak memiliki dua fungsi yaitu : ¹⁵

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan).

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 34

¹⁵ Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung : Refika Aditama, 2013, hal. 37.

Tahun 2000, maka pembagian pajak daerah menjadi sebagai berikut :¹⁶

1. Pajak Provinsi terdiri dari :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas Air
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Balik Nama Kendaraan di Atas Air
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - d) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a) Pajak Hotel
 - b) Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g) Pajak Parkir

2.1.2.2 *Retribusi Daerah*

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pelayanannya.¹⁷

¹⁶ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2010, hal. 104.

¹⁷ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2010, hal. 55.

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Penetapan jenis retribusi dalam tiga golongan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.

Sifat-sifat retribusi menurut Haritz adalah :

- 1) Pelaksanaan bersifat ekonomis
- 2) Ada imbalan langsung kepada pembayar
- 3) Iuran memenuhi persyaratan formal dan material tetapi ada alternatif untuk membayar
- 4) Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol
- 5) Dalam hal-hal tertentu retribusi digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah guna memenuhi permintaan masyarakat.

2.1.2.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain : penerimaan dari BPD, perusahaan daerah, dividen BPR-BKK dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

2.1.2.4 Lain-lain PAD yang sah

Terdiri dari semua penerimaan daerah selain yang disebutkan di atas. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas

daerah, sewa tanah dan gedung milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.

2.1.3 Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam pemerintahan Islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah terdapat sebuah lembaga untuk menampung harta yang dimiliki kaum muslimin yang disebut dengan Baitul maal. Pendirian Baitul maal dalam konsep Islam merupakan tempat pengumpulan harta yang sanga srategis, dan sekaligus digunakan sebagai tempat pendistribusian sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁸

Pendapatan negara dalam Ekonomi Islam terdiri dari :

a. Zakat

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memnuhi syarat syariat Islam guna duberikan kepada berbagai ynsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.¹⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah 2 : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ قُلْ إِنَّمَا نَحْنُ مُبَشِّرُونَ
خَيْرٌ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ قُلْ إِنَّا نَحْنُ مُبَشِّرُونَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: "Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*²⁰

¹⁸ Sulaeman Jajuli, *Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam (Baitul maal sebagai Basis Pertama dalam Pendapatan Islam)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.

¹⁹ Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto dan Nurul Huda, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana : Jakarta, 2007, hal. 205.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), hal. 17.

Pada masa Rasulullah, obyek zakar terdiri dari :

- 1) Benda logam yang terbuat dari perak seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya.
- 2) Binatang ternak seperti onta, sapi, domba, dan kambing.
- 3) Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
- 4) Hasil pertanian termasuk buah-buahan ('ushr).
- 5) Luqatah, harta benda yang ditinggalkan musuh.
- 6) Barang temuan.

b. Ghanimah

Menurut Sa'id Hawwa, ghanimah adalah harta yang diperoleh kaum muslim dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan kuda dan unta perang yang memunculkan rasa takut dalam hati kaum musyrikin. Ghanimah merupakan sumber pendapatan utama negara Islam periode awal.²¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal 8 : 41

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَلِیَتَامَىٰ وَلِمَسْكِينٍ وَبَنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا
 عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَيْنِ قُلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : “Dan ketauhilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqan,

²¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 29.

yaitu hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”²² (QS. Al-Anfal 8 : 41)

c. Fay’i

Fay’i adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa melakukan peperangan seperti harta tidak bergerak (tanah).ketentan Allah dalam Q.S Al-Hasyr 59 : 6

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْ جَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ
وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ قُلَى وَاللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: ”Dan harta rampasan fai’ dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”²³

d. Sedekah

Sedekah berasal dari kata (shadaqa) yang berarti benar. Ialah membenaran (pembuktian) dari syahadat (keimanan) kepada Allahh SWT dan Rasul-Nya yang diwujudkan dalam pengorbanan materi. Sebagai mana dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah 2 : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ قُلَى وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَ
خَذِيهِ إِلَّا أَنْتُمْغِضُوا فِيهِ قُلَى وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu

²² Kementerian Agama Republik Indonesia , *Al-Qur’an Terjemah & Tajwid* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h. 182.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia , *Al-Qur’an Terjemah & Tajwid* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h. 546.

kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri ridak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."²⁴

e. Jizyah

Jizyah berasal dari kata jaza' yang berarti kompensasi. Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non-muslim di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas idup dan properti dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing.²⁵ Seperti telah disebutkan dalam Q.S At-Taubah 9 : 29

فَا تَيْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan terkutuk".*²⁶

f. Kharaj

Secara harfiah kharaj yaitu kontrak, sewa-menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah dimana apara pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Negara Islam setelah penaklukan adalah pemilik atas

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h. 45.

²⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 103.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h. 191.

wilayah itu, dan pengelola harus membayar sewa kepada negara Islam.²⁷

g. ‘Ushr

Dikalangan ahli fiqh, sepersepuluh (ushr) memiliki dua arti. Pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Hal ini termasuk zakat yang diambil dari seorang muslim dan didistribusikan sebagaimana distribusi zakat. Kedua, sepersepuluh diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan.

h. Waqaf

Dalam hukum Islam, waqaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seorang atau nadzir (penjaga waqaf) baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwaqafkan keluar dari hak milik yang mewaqafkan (wakif), dan bukan pula hak milik nadzir/lembaga pengelola waqaf tetapi menjadi hak milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.²⁸ Waqaf merupakan infaq fii sabilillah seperti firman Allah dalam Q.S Ali-‘Imran 3 : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ^{قلى} وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui".²⁹

²⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 109.

²⁸ Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto dan Nurul Huda, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana : Jakarta, 2007, h. 215.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h. 62.

i. Khums

Menurut Abu Ubaid, yang dimaksud khums bukan hanya rampasan perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang.³⁰ Pengenaan pajak barang tambang dan galian adalah agar penambang tidak semena-mena dalam menambang kekayaan alam yang ada dipermukaan bumi.

2.2 Pariwisata

Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa arab dengan kata "al-Siyahah, al-Rihlah, dan al-Safar" atau dalam bahasa Inggris dengan istilah "tourism", dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh manusia baik perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri maupun negara lain dengan menggunakan kemudahan jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memenuhi keinginan wisatawan dengan tujuan tertentu.³¹

Menurut UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Seseorang dapat melakukan perjalanan dengan berbagai cara karena alasan yang berbeda pula. Suatu perjalanan dikatakan sebagai perjalanan wisata apabila :

- a. Bersifat sementara
- b. Bersifat sukarela atau tidak terjadi karena paksaan
- c. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta

³⁰ Muhammad Iqbal, *Pajak Dalam Islam*, Universitas Perbanas, desember 2016.

³¹ Johar Arifin, *Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata*, Journal Uin Suka, 2015, h. 147

meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kepariwisataaan diselenggarakan dengan prinsip :³²

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal.
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional.
- d. Memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan.
- e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
- f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional, dan
- h. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gamal Suwanto berpendapat bahwa hakikat wisata adalah suatu proses kepergian sementara baik secara perorangan maupun kelompok menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman, untuk belajar, mendapatkan kenikmatan dan hasrat ingin mengetahui sesuatu.³³ Hakikat

³² Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Bab III pasal 4.

³³ Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Pariwisata Yogyakarta* : Andi, 2007, h. 3.

wisata adalah kesenangan dan kepuasan, yang muncul ketika ilmu dan wawasan wisatawan bertambah setelah menyaksikan berbagai peristiwa alam, termasuk keanekaragamannya sehingga mereka mampu menghadirkan dalam hatinya kemahabesaran Allah sebagai pencipta segala sesuatu, termasuk apa yang dia saksikan ketika berwisata.³⁴

Bagi Islam, kesenangan dan kepuasan yang diinginkan adalah untuk kepentingan kehidupan dunia dan akhirat. Karena itu, ketika berwisata hendaknya selalu berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan agama, sehingga apa yang mereka lakukan mendapat ridha dan petunjuk dari Allah, termasuk perasaan senang dan puas yang muncul ketika menyaksikan berbagai ciptaan-Nya. Allah memerintahkan kepada umat manusia agar merasa senang dan bergembira ketika mendapatkan karunia dan rahmat-Nya.³⁵

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata

Hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata berupa hotel atau penginapan, restoran, obyek wisata, souvenir, agen travel, dapat menjadi sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Daerah Istimewa Yogyakarta dari sektor pariwisata :

1. Jumlah Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata. Para wisatawan datang ke daerah tujuan wisata dengan tujuan yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka datang untuk urusan bisnis, tetapi ada juga yang datang dengan tujuan mencari hiburan dan kesenangan. Daerah tujuan wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas

³⁴ Muhammad Amir HM, *Wisata dalam Wawasan Al-Qur'an*, Yogyakarta : Mitra Cendekia Mahameru, 2011, hal. 9.

³⁵ *Q.S Yunus / 10 : 58.*

pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Setiap wisatawan yang berkunjung pasti memerlukan bermacam-macam produk yang ada di tempat tujuan wisata baik makanan, pakaian, dan oleh-oleh dari tempat wisata. Hal tersebut menimbulkan sikap konsumtif pada wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Sikap konsumtif dari para wisatawan akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata. Maka semakin besar arus kunjungan wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, semakin meningkat pula pendapatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari sektor pariwisata.

2. Pendapatan perkapita

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah. Pendapatan perkapita dapat diketahui dari hasil pembagian Pendapatan Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan perkapita sering dijadikan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin besar pula kemungkinan daerah tersebut memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata memiliki tingkat sosial ekonomi menengah-tinggi. Mereka memiliki pendapatan dan gaya hidup yang besar. Dengan kata lain mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan primer dan memiliki uang lebih untuk melakukan perjalanan wisata. Maka semakin tinggi rata-rata pendapatan seseorang, semakin tinggi pula keinginan mereka untuk bersenang-senang sehingga akan berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan Daerah Istimewa Yogyakarta dari sektor pariwisata.

3. Tingkat Hunian Hotel

Hotel merupakan bangunan khusus yang disediakan bagi masyarakat, untuk dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan membayar sejumlah uang. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Tingkat hunian hotel adalah suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar-kamar terjual, dibandingkan dengan jumlah seluruh kamar yang mampu dijual. Menurut Agin dan Christiono tingkat hunian kamar hotel adalah banyaknya kamar yang dibuni dibagi kamar yang disediakan dikalikan seratus persen.³⁶ Banyaknya wisatawan yang diikuti dengan lama waktu tinggal di suatu daerah tujuan wisata akan membawa dampak positif terhadap tingkat hunian kamar hotel. Semakin banyak kamar hotel yang terjual, semakin besar pula pendapatan yang akan diterima oleh pengelola hotel tersebut.

Saat ini semakin banyak pembangunan hotel, baik menambah jumlah kamar hotel maupun pengadaan bangunan baru. Bahkan tidak hanya hotel secara umum tetapi juga hotel dengan sistem syariah. Beberapa hotel syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Hotel Adilla Syariah, Hotel Desa Puri Syariah, Royal Homy Syariah, Hotel Alzara Syariah, dan Hotel Sofyan Inn Unisi.

³⁶ Widyaningrum, *Pengaruh Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Wisatawan, dan Jumlah Objek Wisatawan terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Kudus Tahun 1981-2011*, Skripsi Dipublikasikan. Semarang : Universitas Negeri Semarang, h. 25.

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penelitian terdahulu berguna sebagai rujukan atau referensi dan sebagai bahan untuk membantu penulis dalam proses penyusunan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk membantu proses penyusunan penelitian ini adalah :

1. Ferry Pleanggra (2012) , dalam penelitian yang berjudul ”Analisis Pengaruh Objek Wisata, Jumlah Wisatawan, dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Retribusi Objek Pariwisata 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah” dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menghasilkan kesimpulan bahwa jumlah objek pariwisata, jumlah wisatawan dan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan retribusi objek pariwisata di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
2. Nasrul Qadarrhman (2010), dalam penelitiannya yang berjudul ”Analisis Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kota Semarang dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya” dengan penerimaan daerah dari sektor pariwisata sebagai variabel dependen dan empat variabel independen yaitu jumlah objek pariwisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, dan pendapatan perkapita. Analisis regresi berganda menghasilkan kesimpulan bahwa keempat variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Secara parsial variabel jumlah objek pariwisata, jumlah wisatawan, dan tingkat hunian hotel berpengaruh signifikan sedangkan variabel pendapatan perkapita tidak signifikan.
3. Ninie Punnkasari (2018), dalam penelitiannya yang berjudul ” Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2010-2016)” dengan variabel Pendapatan Asli Daerah sub sektor pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai variabel dependen dan empat variabel independen yaitu jumlah

hotel, jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, jumlah biro perjalanan wisata. Hasil analisis regresinya adalah variabel jumlah hotel, jumlah objek pariwisata, dan jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sub sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan variabel jumlah biro perjalanan wisata tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sub sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Femy Nadia Rahma, Herniawati Retno Handayani (2013), dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Kudus" dengan menggunakan variabel dependen berupa penerimaan sektor pariwisata Kabupaten Kudus dan empat variabel Independen yaitu jumlah wisatawan, jumlah objek pariwisata, dan pendapatan perkapita. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata, dan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata Kabupaten Kudus
5. Novi Dwi Purwanti, Retno Mustika Dewi (2013), dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013" dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Mojokerto sebagai variabel dependen dan jumlah kunjungan wisatawan sebagai variabel independen. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mojokerto karena menurunnya jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2011.

Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata. Terdapat persamaan dan perbedaan antara

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dari uraian penelitian terdahulu, penelitian penulis lebih condong pada penelitian yang dilakukan oleh Ferry Pleanggra yang berjudul “Analisis Pengaruh Objek Wisata, Jumlah Wisatawan, dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Retribusi Objek Pariwisata 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah”. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di sebuah daerah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini yaitu terdapat pada variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menambahkan variabel tingkat hunian hotel sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan asli daerah. Selain itu perbedaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada objek penelitian dan tambahan ayat serta hadits yang menjelaskan tentang penelitian penulis. Dalam penelitian saat ini penulis memilih Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitian.

2.5 Pengembangan Hipotesis

Rahman (2018), yang menyatakan bahwa Jumlah Wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Karena semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata, maka semakin banyak pula jasa dan produk-produk di daerah wisata tersebut yang terjual. Dengan begitu pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui pajak maupun retribusi yang diterima.

H_1 : Jumlah Wisatawan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rahma dan Handayani (2013), menyatakan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata. Artinya semakin besar pendapatan perkapita maka semakin besar pula penerimaan yang diperoleh dari sektor pariwisata.

H_2 : Pendapatan Perkapita berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

Punkkasari (2018), mengatakan bahwa jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sub sektor pariwisata. Karena semakin banyak jumlah hotel yang terjual, semakin banyak pula penghasilan yang diterima oleh pengelola hotel dan pada akhirnya pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

H₃ : Tingkat Hunian Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang digunakan adalah data *time series* yaitu rangkaian data yang berupa nilai pengamatan yang diukur selama kurun waktu tertentu, berdasarkan waktu dengan interval yang sama. Data yang akan digunakan mulai tahun 2003 sampai 2017. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, jumlah hunian hotel dan pendapatan perkapita serta Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertik bangan tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah wisatawan, jumlah hunian hotel dan pendapatan perkapita serta Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY pada tahun 2003-2017.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam sebah penelitian dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, realistis dan relevan. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan dokumentasi, yaitu dengan

mengumpulkan catatan dan data-data yang diperlukan dalam penelitian dari instansi terkait. Pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka dari buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan penerbitan lainnya yang relevan dengan penelitian.

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas. Sedangkan variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan variabel independennya adalah jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, jumlah hunian hotel, dan pendapatan perkapita.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. PAD dari sektor pariwisata di DIY merupakan penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi dari sektor pariwisata. Data jumlah PAD DIY dari sektor pariwisata diperoleh dari buku statistik kepariwisataan Dinas Pariwisata DIY yang diambil berdasarkan tahun 2003-2017.

2. Variabel Independen

a. Jumlah wisatawan

Data jumlah wisatawan merupakan gabungan dari wisatawan domestik dan mancanegara pada masing-masing kabupaten/kota.

b. Pendapatan perkapita

Merupakan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat pada periode 2003-2017 di DIY.

c. Tingkat hunian hotel

Data jumlah hunian hotel merupakan penggabungan dari data jumlah hotel berbintang dan non bintang pada masing-masing kabupaten di DIY.

3.5 Definisi Operasional

3.5.1 Jumlah Wisatawan

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatahan menyebutkan bahwa wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Sihite membedakan pengertian wisatawan menjadi dua, yaitu :³⁷

- a. Wisatawan manca negara yaitu warga negara suatu negara yang mengadakan perjalanan wisata keluar lingkungan dari negaranya (memasuki negara lain).
- b. Wisatawan domestik adalah wisatawan dalam negeri.

Banyaknya wisatawan yang berkunjung pada sebuah objek wisata berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang diterima oleh sektor tersebut. Wisatawan yang datang pada daerah tersebut akan menambah pendapatan bagi daerah dan wisatawan asing yang datang akan menambah devisa negara yang dikunjunginya.

3.5.2 Tingkat Hunian Hotel

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.³⁸ Tingkat hunian hotel yaitu suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah

³⁷ R. Sihite, *Tourism Industry*. Surabaya: SIC, 2000, h. 49

³⁸ A. Sulastiono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, Bandung : Alfabeta, 2011, h. 5.

kamar yang terjual jika dibandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu dijual. Semakin tinggi tingkat hunian sebuah hotel maka semakin tinggi pula pendapatan dan keuntungan yang diperoleh.

3.5.3 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah. Pendapatan perkapita sering dijadikan tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin besar pula kemungkinan daerah tersebut memiliki tingkat pembangunan yang tinggi.

3.5.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah yang selanjutnya disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁹ Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu peningkatan pendapatan merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.⁴⁰

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda, yaitu untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi merupakan

³⁹ Warsito, *Hukum Pajak*, Jakarta : PT Rajawali Grafindo Persada, 2001, h. 128.

⁴⁰ Mamesa, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta : PT Graedia Pustaka Utama, 1995, h. 30.

suatu metode yang digunakan untuk menganalisa hubungan antar variabel dependen Y dengan satu atau lebih variabel independen.

3.7 Uji Asumsi Klasik

Secara teoritis salah satu metode pendugaan parameter dalam model regresi linear adalah *Ordinary Least Square (OLS)*. Metode OLS digunakan berdasarkan pada sejumlah asumsi tertentu. Pada prinsipnya, model regresi linear yang dibangun sebaiknya tidak boleh menyimpang dari asumsi BLUE (*Best, Linear, Unbiased, dan Estimator*). Dalam pengertian lain, model yang dibuat harus lolos dari penyimpangan asumsi adanya serial korelasi, normalitas, linearitas, heteroskedastisitas dan multikolinieritas.

3.7.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi adalah sebagai berikut :

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi

antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas

- c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya.
- d. Melakukan regresi parsial.

3.7.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Sedangkan pada data silang waktu (cross section) masalah autokorelasi relatif jangan terjadi karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu/kelompok yang berbeda.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu :⁴¹

- a. Uji Durbin – Watson (DW test)

Uji Durbin – Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen.

⁴¹ Prof. Dr. H. Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, 2013. Hal. 111-118

b. Uji Lagrange Multiplier (LM test)

Uji autokorelasi dengan LM test terutama digunakan untuk sampel besar di atas 100 observasi. Uji ini lebih tepat digunakan dibandingkan uji DW terutama jika sampel yang digunakan relatif besar dan derajat autokorelasinya lebih dari satu.

c. Uji Statistics Q : Box-Pierce dan Ljung Box

Uji Box Pierce dan Ljung Box digunakan untuk melihat autokorelasi dengan lag lebih dari dua.

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.⁴² Terdapat beberapa metode untuk mengidentifikasi adanya heteroskedastisitas, antara lain: metode grafik, metode *Park*, metode *rank Spearman*, metode *Lagrangian Multiflier (LM test)* dan *white heteroscedasticity test*.

3.7.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pendugaan persamaan dengan menggunakan metode OLS harus memenuhi sifat kenormalan, karena jika tidak normal dapat menyebabkan varians infinitif (ragam tidak hingga atau ragam yang sangat besar). Hasil pendugaan yang memiliki varians infinitif menyebabkan pendugaan dengan metode OLS akan menghasilkan nilai dugaan yang tidak berarti. Salah satu metode

⁴² Prof. Dr. H. Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, 2013, h. 139.

yang banyak digunakan untuk menguji Normalitas adalah *Jarque-Bera test*.⁴³

Pada program Eviews, pengujian normalitas dilakukan dengan *Jarque-Bera test*. *Jarque-Bera test* mempunyai distribusi chi square dengan derajat bebas dua. Jika hasil *Jarque-Bera test* lebih besar dari nilai chi square pada $\alpha=5$ persen, maka H_0 ditolak yang berarti tidak berdistribusi normal. Jika *Jarque-Bera test* lebih kecil dari nilai chi square $\alpha=5$ persen, maka H_0 diterima yang berarti *error term* berdistribusi normal.⁴⁴

Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu :

a. Analisis Grafik

Cara yang pertama untuk melihat normalitas residual adalah melalui grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Akan tetapi metode yang lebih baik adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :

⁴³ Unit Pengembangan Fakultas Ekonomika Universitas Diponegoro, *Modul Eviews 6*, 2011, h. 22.

⁴⁴ Unit Pengembangan Fakultas Ekonomika Universitas Diponegoro, *Modul Eviews 6*, 2011, hal. 22

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Analisis Statistik

Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran asumsi normalitas melalui analisis grafik, dianjurkan untuk melengkapi dengan uji statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual.

3.8 Analisa Model Regresi

3.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar variasi total pada variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya dalam regresi tersebut. Nilai dari koefisien determinasi ialah 0 hingga 1. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel dalam model tersebut dapat mewakili variabel dependennya. Nilai R^2 sama dengan atau mendekati 0 (nol) menunjukkan variabel dalam model yang dibentuk tidak dapat menjelaskan variasi dalam variabel tersebut.

Nilai koefisien determinasi akan cenderung semakin besar bila jumlah data yang diobservasi semakin banyak. Oleh karena itu, maka digunakan ukuran *adjusted* R^2 (R^2), untuk menghilangkan

bias akibat adanya penambahan jumlah variabel bebas dan jumlah data yang diobservasi.

3.8.2 Uji t-Statistik

Uji t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Uji t-statistik biasanya berupa pengujian hipotesa:

H_0 = Variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat

H_1 = Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat

3.8.3 Uji Variansi/Uji F-statistik

Uji F-statistik ialah untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Uji F-statistik biasanya berupa:

H_0 = Variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat

H_1 = Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat

Jika dalam pengujian H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan linier antara variabel dependen dengan variabel independen.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

DIY terletak di bagian tengah-selatan Pulau Jawa dengan luas 3.185,80 km². Secara geografis terletak pada 7^o 33'-8^o 12' Lintang Selatan dan 110^o 00'-110^o 50' Bujur Timur.⁴⁵ Secara administratif terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa, yaitu:⁴⁶

Tabel 4.1

Kabupaten/Kota	Luas Area	Kecamatan	Kelurahan/Desa
Kota Yogyakarta	32,50 km ²	14 kecamatan	45 kelurahan
Kab. Bantul	506,85 km ²	17 kecamatan	75 desa
Kab. Kulon Progo	586,27 km ²	12 kecamatan	88 desa
Kab. Gunungkidul	1.485,36 km ²	18 kecamatan	144 desa
Kab. Sleman	574,82 km ²	17 kecamatan	86 desa
DIY	3.185,80 km²	78 kecamatan	438 kelurahan/desa

DIY di bagian Selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian Timur Laut, Tenggara, Barat dan Barat Laut dibatasi oleh wilayah Jawa Tengah yang meliputi:

- a. Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut;
- b. Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara;
- c. Kabupaten Purworejo di sebelah Barat;
- d. Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut.

⁴⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka*, Yogyakarta : CV. Magna Rahajar Tama (MAHATA) 2017, h.5

⁴⁶ Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, *Statistik Kepariwisataaan*, 2017.

4.1.2 Kondisi Topografi

Secara topografi, DIY dapat dikelompokkan menjadi empat satuan wilayah sebagai berikut:

1. Satuan Gunung Merapi, yang terbentang mulai dari kerucut gunung berapi yang merupakan daerah hutang lindung hingga dataran fluvial gunung berapi termasuk juga bentang lahan vulkanik, meliputi Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Bantul.
2. Satuan Pegunungan Selatan atau Pegunungan Seribu, yang terletak di wilayah Gunungkidul, merupakan kawasan perbukitan batu gamping (limestone) dan bentang alam karst yang tandus dan kekurangan air permukaan, dengan bagian tengah merupakan cekungan Wonosari (Wonosoari Basin) yang telah mengalami pengangkatan secara tektonik sehingga terbentuk menjadi plato Wonosari (dataran tinggi Wonosari).
3. Satuan Pegunungan Kulon Progo yang terletak di Kulon Progo bagian utara, merupakan bentang lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit, kemiringan lereng curam dan potensi air tanah kecil.
4. Satuan Dataran Rendah merupakan bentang lahan fluvial (hasil proses pengendapan sungai) yang didominasi oleh dataran aluvial, membentang di bagian selatan DIY mulai dari Kulon Progo sampai Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Satuan ini merupakan daerah yang subur. Termasuk dalam satuan ini adalah bentang lahan marin dan eolin yang belum didayagunakan, merupakan wilayah pantai yang terbentang dari Kulon Progo sampai Bantul. Khusus bentang lahan marin dan eolin di Parangtritis Bantul,

yang terkenal dengan gumuk pasirnya, merupakan laboratorium alam untuk kajian bentang alam pantai.⁴⁷

4.1.3 Pertumbuhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pertumbuhan ekonomi DIY dari tahun 2007-2016 secara umum menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan ini diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor seperti, penanaman modal asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), tenaga kerja, konsumsi dan lain sebagainya. Sektor Industri dan pariwisata sangat membutuhkan investasi untuk dapat mengembangkan usahanya, sehingga ketika kedua sektor andalan ini berkembang maka akan menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.2

PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2016
Atas Dasar Harga Konstan

Tahun	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2007	18.307.848	-
2008	19.210.123	4,93
2009	20.051.976	4,38
2010	21.044.042	4,95
2011	22.131.774	5,17
2012	23.226.811	4,95
2013	24.505.155	5,50
2014	25.897.544	5,68
2015	27.407.014	5,83
2016	29.042.373	5,97

Sumber : Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta

⁴⁷ Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, *Statistik Kepariwisataaan*, 2017.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui pada tahun 2009 dan 2012 pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka negatif meskipun secara nominal mengalami peningkatan dari 19.210.123 juta menjadi 20.051.976 juta dan dari 22.131.774 juta menjadi 23.226.811 juta.

4.1.4 Potensi Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selain dikenal sebagai sebutan kota perjuangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta juga dikenal dengan pesona alamnya. Hingga sekarang DIY masih merupakan daerah tujuan wisata yang terkenal di Indonesia dan Mancanegara. Bangunan-bangunan bersejarah seperti, candi Prambanan dan Ratu Boko, Keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat, Kota Tua Kota Gedhe, Makam Raja-raja Mataram, dan museum-museum masih terjaga/lestari hingga saat ini. Begitu juga dengan potensi alam Yogyakarta seperti kawasan Kaliurang dan Gunung Merapi, kawasan Nglanggeran, Tahura Bunder, puncak Suroloyo/perbukitan Menoreh, pegunungan Karts, Gumuk Pasir serta keindahan pantai selatan (pantai Kukup, Baron, Krakal, Siung, Ngrehan, Sundak, Sadeng, Parangtritis, Goa Cemara, Pandasimo, Glagah, dll).

Masyarakat Yogyakarta masih memegang teguh tatanan kehidupan Jawa yang tercermin pada adat-istiadat, bahasa, sosial kemasyarakatan, kesenian, dan lain sebagainya. Namun demikian masyarakat Yogyakarta tidak menutup diri terhadap tumbuhnya budaya kontemporer maupun budaya lainnya. Disamping beragamnya pesona objek dan daya tarik wisata disediakan pula sarana dan prasarana sebagai penunjang pariwisata seperti, akomodasi, restoran/rumah makan, telekomunikasi, tempat hiburan, toko souvenir, dan lain sebagainya.

Diluncurkannya slogan “Jogja Istimewa” diharapkan dapat mewujudkan kepariwisataan DIY yang benar-benar istimewa.

Keistimewaan tersebut diharapkan dapat tercermin dari tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen pengelolaan Daya Tarik Wisata yang baik, maupun industri kepariwisataan yang berkualitas.⁴⁸

Tabel 4.3

Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara di Daya Tarik Wisata Provinsi DIY Tahun 2007-2017

Tahun	Wisnus	Pertumbuhan (%)	Wisman	Pertumbuhan (%)
2008	5.953.375	-	315.992	-
2009	7.200.384	20,95	683.829	116,41
2010	7.855.784	9,10	415.204	-39,28
2011	8.839.624	12,52	461.162	11,07
2012	10.880.125	23,08	499.515	8,32
2013	12.377.385	13,76	647.833	29,69
2014	16.288.445	31,60	572.802	-11,58
2015	18.780.137	15,30	493.449	-13,85
2016	20.933.798	11,47	511.545	3,67
2017	25.349.012	21,09	601.781	17,64

Sumber : Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta

Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung di Provinsi DIY pada periode 2007-2017 selalu mengalami peningkatan walaupun pertumbuhannya berfluktuatif. Akan tetapi kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan pada tahun 2010, 2014 dan 2015 masing masing sebesar 39.28 %, 11.58 % dan 13.85 %. Peningkatan kunjungan wisatawan didukung adanya beragam

⁴⁸ Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, *Statistik Kepariwisataaan*, 2017.

potensi wisata dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai oleh pemerintah.

4.2 Perkembangan Kegiatan Pariwisata di Provinsi DIY

4.2.1. Penerimaan Daerah

Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah adalah melalui Pendapatan Asli Daerah. Komponen Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan laba badan usaha milik daerah. Industri pariwisata berupa hotel/penginapan, restoran, usaha wisata (objek wisata, souvenir, dan hiburan), usaha perjalanan wisata (travel agent dan pemandu wisata), *convention organizer*, dan transportasi dapat menjadi sumber PAD yang berupa pajak, retribusi daerah, laba BUMD, pajak dan bukan pajak.

Tabel 4.4

Rincian Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata DIY
Tahun 2017

Sumber	2017	Prosentase (%)
Pajak Hotel dan Restaurant	334.110.687.524	79,0
Pajak Tontonan/Hiburan	31.771.973.336	7,5
Retribusi Objek dan Daya Tarik Usaha	54.324.908.100	12,8
Retribusi Penggunaan Aset Milik Pemda (Sewa, kontrak/Bagi Hasil)	2.939.041.854	0,7

Sumber : Buku Statistik Kepariwisata D.I. Yogyakarta

Dilihat dari tabel di atas, penerimaan dari sektor pariwisata pada dasarnya terdiri dari pajak dan retribusi. Penerimaan terbesar bersumber dari pajak Hotel dan Restoran yaitu sebesar Rp334.110.687.524 dengan prosentase sebesar 79.0 %. Penerimaan terbesar kedua dari sektor pariwisata DIY adalah retribusi Objek dan Daya Tarik Usaha sebesar 54.324.908.100 dengan prosentase sebesar 12.8 %. Ini berarti penyumbang terbesar dalam penerimaan sektor pariwisata DIY diperoleh dari pajak sebesar 91.8 % dari seluruh total penerimaan sektor pariwisata.

Besarnya penerimaan sektor pariwisata DIY tahun 2003-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Penerimaan Sektor Pariwisata DIY
Tahun 2003-2017

Tahun	Penerimaan Sektor Pariwisata (rupiah)	Pertumbuhan (%)
2003	22.033.378.144	-
2004	27.470.990.807	24,68
2005	44.268.424.663	61,15
2006	67.521.209.752	52,53
2007	56.709.184.190	-16,01
2008	78.189.082.649	37,88
2009	89.910.353.874	14,99
2010	95.863.242.777	6,62
2011	106.215.569.037	10,80
2012	153.174.399.477	44,21
2013	188.839.015.344	23,28
2014	236.955.587.690	25,48
2015	266.933.359.315	12,65

2016	353.913.365.540	32,58
2017	423.146.610.814	19,56

Sumber : Buku Statististik Kepariwisata D.I Yogyakarta

Penerimaan sektor pariwisata DIY mengalami penurunan pada tahun 2007 sebesar 16.01 % dari 67.521.209.752 pada tahun 2006 menjadi 56.709.184.190. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh dampak gempa bumi tektonik pada tahun 2006 yang mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 dengan kekuatan gempa 5,9 skala richter.⁴⁹ Karena itu, pemerintah harus melakukan perbaikan sehingga menghimbau para wisatawan untuk menunda kunjungannya ke objek-objek tersebut.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa jumlah objek wisata dan jumlah wisatawan memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan penerimaan sektor pariwisata sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah.

4.3 Deskripsi Variabel

4.3.1 Jumlah Wisatawan

Industri pariwisata menunjukkan perkembangan yang positif setiap tahunnya. Hal ini didorong oleh kemajuan teknologi dan informasi yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses berbagai macam informasi secara cepat dan tepat. Disamping itu, perkembangan teknologi transportasi memudahkan masyarakat untuk melakukan perjalanan di berbagai tempat dalam waktu yang singkat.

Saat ini setiap negara sedang melakukan pembangunan sektor pariwisata dan menarik wisatawan sebanyak-banyaknya untuk menyumbang penerimaan negaranya. Begitu pula provinsi DIY melakukan penambahan objek wisata dan akomodasi guna

⁴⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Yogyakarta_2006 diakses Rabu, 3 Juli 2019 pukul 09.30 WIB.

meningkatkan kunjungan wisatawan. Wisatawan yang berkunjung ke DIY didominasi oleh wisatawan nusantara.

Berikut adalah jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY baik wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

Tabel 4.6

Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung ke DIY

Tahun 2003-2017

Tahun	Wisatawan	Pertumbuhan
2003	3.778.951	-
2004	7.363.821	94,86
2005	5.064.341	-0,31
2006	2.403.837	-0,53
2007	5.249.738	1,18
2008	7.212.244	0,37
2009	9.716.424	0,35
2010	8.157.393	-0,16
2011	9.342.243	0,15
2012	11.507.556	0,23
2013	11.666.232	0,01
2014	13.943.387	0,20
2015	19.022.318	0,36
2016	21.445.343	0,13
2017	25.950.793	0,21

Sumber : Badan Pusat Statistik D.I Yogyakarta

Jika dilihat dari tabel di atas, sejak tahun 2003 sampai 2010 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi DIY berfluktuatif. Akan tetapi mulai tahun 2011 kunjungan wisatawan mulai stabil dan menunjukkan tren positif. Jumlah kunjungan wisatawan ke DIY terendah pada tahun 2006. Hal ini disebabkan adanya bencana

gempa bumi tektonik pada tanggal 27 Mei 2006 dengan kekuatan gempa 5,9 skala richter yang menyebabkan kerusakan gedung, situs kuno, dan lokasi wisata. Situs kuno dan lokasi wisata yang mengalami kerusakan adalah Candi Prambanan, makam Imogiri, bangsal Trajumas di keraton Yogyakarta, candi Borobudur dan objek wisata Kasongan.⁵⁰ Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun ini hanya sebesar 2.403.837 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2007 menjadi 5.249.738. Walaupun pertumbuhannya berfluktuatif tetapi menunjukkan perkembangan yang baik.

4.3.2 Tingkat Hunian Hotel

Hotel merupakan tempat yang disediakan bagi para konsumen untuk menginap atau tinggal sementara waktu yang dilengkapi dengan fasilitas seperti restoran, tempat pertemuan, dan lain-lain. Menurut Abdullah dan Moh Hairil Hamdan, agar dapat bertahan dalam persaingan, operator hotel secara konsisten harus meningkatkan faktor internal mereka untuk mencapai kesuksesan dalam mencapai tingkat hunian hotel yang diinginkan.⁵¹ Karena tingkat hunian kamar hotel merupakan tolok ukur dalam meningkatkan pendapatan yang diterima.

Perkembangan hotel tidak hanya dilakukan dengan pendirian hotel-hotel baru, melainkan pengadaan kamar-kamar pada hotel yang telah ada. Pada masa sekarang, hotel tidak hanya digunakan sebagai peminatan dalam kegiatan pariwisata tetapi digunakan juga untuk kegiatan bisnis seperti mengadakan seminar, acara keluarga, dan lain sebagainya. Perhotelan menjadi salah satu penggerak perekonomian pemerintah daerah salah satunya meningkatkan PAD. Disamping itu, industri perhotelan dapat menyerap banyak

⁵⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Yogyakarta_2006 diakses Rabu, 3 Juli 2019 pukul 09.30 WIB,

⁵¹ Abdul Aziz Abdullah dan Mohd Hairil Hamdan, *internal Succes Factor of Hotel Occupancy Rate*. International Journal of Business and Social Science. Vol.3 No. 22.

tenaga kerja karena merupakan industri yang menyediakan jasa bagi masyarakat sehingga membutuhkan banyak tenaga.

Tingkat hunian hotel merupakan perbandingan antara jumlah kamar terjual dengan jumlah semua kamar yang siap untuk dijual. Semakin tinggi tingkat hunian hotel, semakin banyak pula penghasilan yang diterima oleh hotel sehingga akan meningkatkan penerimaan daerah dari pajak penghasilan.

Tabel 4.7

Tingkat hunian hotel berbintang dan hotel melati DIY

Tahun 2003-2017

Tahun	Tingkat Hunian Hotel	Pertumbuhan (%)
2003	37,36	-
2004	38,37	2,70
2005	35,92	-6,39
2006	34,46	-4,06
2007	38,27	11,06
2008	42,70	11,58
2009	42,75	0,12
2010	43,68	2,18
2011	45,34	3,80
2012	46,98	3,62
2013	48,63	3,51
2014	50,27	3,36
2015	51,09	1,63
2016	52,94	3,62
2017	55,68	5,19

Sumber : Badan Pusat Statistik D.I Yogyakarta

Tabel di atas menunjukkan tingkat hunian hotel di DIY selama 15 tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan terbesar pada tahun 2008 yaitu sebesar 11.58 %. Penurunan terjadi secara berturut-turut pada tahun 2005 dan 2006 masing-masing sebesar 6,39 % dan 4,06 %.

4.3.3 Pendapatan Perkapita

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya PDRB perkapita sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat didaerah tersebut. Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin baik pula kondisi perekonomian masyarakatnya. Berikut merupakan pendapatan perkapita provinsi DIY atas dasar harga konstan.

Tabel 4.8

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Provinsi DIY
Tahun 2003-2014

Tahun	PDRB Perkapita	Pertumbuhan (%)
2003	4.816.287	-
2004	5.027.492	4,39
2005	5.057.608	0,60
2006	5.272.562	4,25
2007	5.444.868	3,27
2008	5.662.383	3,99
2009	5.855.379	3,41
2010	6.086.507	3,95
2011	20.330.000	234,02

2012	20.184.000	-0,72
2013	21.037.428	4,23
2014	21.867.994	3,95
2015	22.688.207	3,75
2016	23.565.753	3,87
2017	24.534.055	4,11

Sumber : Badan Pusat Statistik D.I Yogyakarta

Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB perkapita berdasar harga konstan 2010. Selama periode 2011-2017 PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 selalu mengalami peningkatan meskipun cenderung melambat. Nilai PDRB perkapita pada tahun 2012 sebesar RP 20.184.000 berangsur-angsur meningkat hingga mencapai Rp 24.534.055 pada tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan per tahun selama periode tersebut adalah 3,98 %.

4.4 Analisis dan Pembahasan

4.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).⁵² Analisis ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁵³

⁵² Prof. Dr. H. Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013, hal. 19

⁵³ Ali Muhson, *Teknik Analisis Kuantitatif*, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>

4.4.2 Uji Asumsi Klasik

4.4.2.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui kesalahan standar estimasi model dalam penelitian. Menguji adanya kasus multikolinearitas dengan patokan nilai VIF (Variance Inflation Faactor). Karim dan Hadi (2007) berpendapat bahwa untuk melihat adanya kasus multikolinearitas adalah dengan VIF, apabila nilai VIF suatu model kurang dari 10, maka model tersebut dinyatakan bebas dari kasus multikolinearitas.

Tabel 4.9

Variance Inflation Factors

Date: 07/12/19 Time: 10:40

Sample: 2003 2017

Included observations: 15

Variable	Coefficien		
	t	Uncentered	Centered
	Variance	VIF	VIF
C	1.53E+21	41.41661	NA
JUMLAH_WISATAWAN	4261776.	18.40742	4.938182
PENDAPATAN_PERKAPITA	2516206.	13.26427	4.498993
TINGKAT_HUNIAN_HOTEL	8.94E+17	47.83052	1.212487

Dari tabel di atas dilihat bahwa nilai VIF dari semua variabel kurang dari 10 sehingga data disimpulkan tidak terdapat kasus multikolinearitas.

4.4.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat diketahui dengan menggunakan Uji Lagrange Multiplier (LM test).

Tabel 4.10

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.038688	Prob. F(2,9)	0.3928
Obs*R-squared	2.812999	Prob. Chi-Square(2)	0.2450

Nilai Prob. Chi-Square merupakan nilai p value dalam uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM, yaitu sebesar 0,2450 dimana $> 0,05$ yang berarti bahwa tidak ada masalah autokorelasi.

4.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji Harvey.

Tabel 4.11

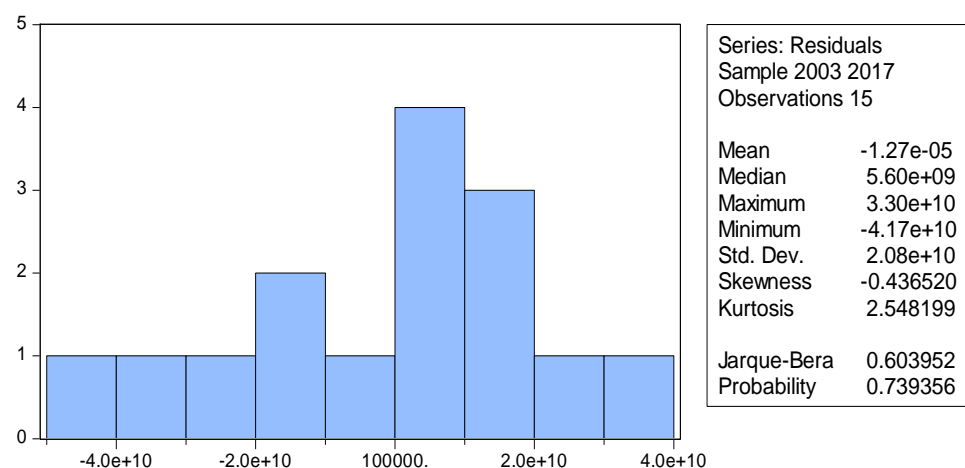
Heteroskedasticity Test: Harvey

F-statistic	0.208789	Prob. F(3,11)	0.8882
Obs*R-squared	0.808122	Prob. Chi-Square(3)	0.8475
Scaled explained SS	0.373120	Prob. Chi-Square(3)	0.9457

Dari tabel hasil pengolahan data di atas, diketahui bahwa nilai probabilitasnya sebesar $0.8882 > 0,05$ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data bebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.4.2.4 Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data penelitian yang diperoleh berdistribusi normal atau mendekati normal.

Tabel 4.12

Dilihat dari tabel diketahui bahwa nilai $0,60 > 0,05$ yang berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal.

Dari hasil pengujian normalitas, dapat disimpulkan bahwa dalam model yang digunakan memenuhi persyaratan normalitas. Hal ini ditunjukkan dengan J-B hitung lebih kecil daripada X^2 -tabel. Selain itu bisa diketahui juga dari tingkat probability sebesar 0.739 ($p > 0.05$) maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

4.4.3 Pengujian Hipotesis dan Persamaan Regresi

Tabel 4.13

Dependent Variable: Penerimaan_Sektor_Pariwisata

Method: Least Squares

Date: 07/12/19 Time: 10:37

Sample: 2003 2017

Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.51E+10	3.91E+10	0.898121	0.3884
Jumlah_Wisatawan	14213.64	2064.407	6.885094	0.0000
Pendapatan_Perkapita	3782.081	1586.255	2.384283	0.0362
Tingkat_Hunian_Hotel	-1.91E+09	9.46E+08	-2.023557	0.0680
R-squared	0.971138	Mean dependent var	1.47E+11	
Adjusted R-squared	0.963267	S.D. dependent var	1.23E+11	
S.E. of regression	2.35E+10	Akaike info criterion	50.82184	
Sum squared resid	6.08E+21	Schwarz criterion	51.01065	
Log likelihood	-377.1638	Hannan-Quinn criter.	50.81983	
F-statistic	123.3763	Durbin-Watson stat	2.377257	
Prob(F-statistic)	0.000000			

4.4.3.1. Uji t-Statistik

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individu maka digunakan uji t.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis yang diambil untuk yang bernilai positif adalah:

H_0 : variabel independen (jumlah wisatawan, pendapatan perkapita, tingkat hunian hotel) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan pariwisata).

H_1 : variabel independen (jumlah wisatawan, pendapatan perkapita, tingkat hunian hotel) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan pariwisata).

Dasar pengambilan keputusan :

- a. Dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel
 - Apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independe terhadap variabel dependen.
 - Apabila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan angka signifikan 5 % ($\alpha = 0.05$) dan nilai df (*degree of freedom*) $n-k$ ($15-3$) = 12, maka dapat diketahui nilai t tabel sebesar 1,782.

- b. Dengan menggunakan angka signifikansi
 - Apabila angka signifikansi > 0.05 , maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
 - Apabila angka signifikansi < 0.05 , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Dari kriteria di atas, akan dijelaskan masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Pengaruh variabel jumlah wisatawan (X_1) terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata (Y).

Hipotesis pertama menyatakan bahwa jumlah wisatawan diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan tabel diketahui nilai t hitung sebesar (6,885) lebih besar dari t tabel (1,782) dan tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 (taraf nyata = 5 persen) yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta terbukti.

2. Pengaruh pendapatan perkapita (X_2) terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata (Y).

Hipotesis kedua menyatakan bahwa pendapatan perkapita diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan tabel diketahui nilai t hitung sebesar (2,384) lebih besar dari t tabel (1,782) dan tingkat signifikansi sebesar 0.0362 lebih kecil dari 0.05 (taraf nyata = 5 persen) yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta terbukti.

3. Pengaruh tingkat Hunian Hotel (X_3) terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata (Y).

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa tingkat Hunian Hotel diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah sektor

pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan tabel diketahui nilai t hitung sebesar (-2.023557) lebih kecil dari t tabel (1,782) dan tingkat signifikansi sebesar 0.0680 lebih besar dari 0.05 (taraf nyata = 5 persen) yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa tingkat Hunian Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terbukti.

4.4.3.2. Uji Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan) digunakan Uji F. Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : variabel independen (jumlah wisatawan, pendapatan perkapita, tingkat hunian hotel) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (penerimaan pariwisata).

H_1 : variabel independen (jumlah wisatawan, pendapatan perkapita, tingkat hunian hotel) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (penerimaan pariwisata).

Dasar pengambilan keputusan:

- a. Dengan membandingkan nilai f hitung dengan F tabel
 - Apabila F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima
 - Apabila F hitung $<$ F tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Dengan tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 0.05$) dan nilai df (*degree of freedom*) = $(n-k-1)$ (k) = $(15-3-1)$ (3) = (11) (3), maka dapat diketahui F tabel sebesar 3,89.

b. Dengan menggunakan angka signifikansi

- Apabila angka signifikansi > 0.05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- Apabila angka signifikansi < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Dapat dilihat pada tabel hasil output regresi linear menunjukkan nilai F-statistik sebesar 123,3763 ($123,3763 > 3,89$) dan angka signifikansi sebesar 0.000 ($0.000 < 0.05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yaitu jumlah wisatawan, pendapatan perkapita, dan tingkat hunian hotel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.4.3.3. *Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)*

Berdasarkan pada tabel hasil output regresi linear diperoleh koefisien determinasi atau R-Square (R^2) sebesar 0.971138 yang berarti 97,1 persen penerimaan daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu jumlah wisatawan, pendapatan perkapita, dan tingkat hunian hotel. Sedangkan sisanya sebesar 2,9 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak termasuk dalam penelitian.

4.4.4 Pembahasan

Analisis data kuantitatif menggunakan regresi linear dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini akan menentukan analisis yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, sebelum

dilakukan pengujian model regresi perlu dilakukan pengujian penyimpangan terlebih dahulu sehingga hasil dari model regresi diharapkan benar-benar sebagai suatu model regresi yang baik dan efisien.

Analisis regresi linear digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan sektor Pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan perhitungan menggunakan Program Eviews 7 diperoleh hasil sebagai berikut :

Dari tabel di atas dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3.51E+10 + 14213.64 X_1 + 3782.081 X_2 - 1.91E+09 X_3$$

$$R\text{-squared} = 0.971138$$

$$F\text{-statistic} = 123.3763$$

Berdasarkan hasil regresi tersebut apabila dilihat dari nilai koefisiennya bahwa dari ketiga variabel tersebut dua diantaranya bersifat elastis karena nilai koefisiennya > 1 dan satu variabel bersifat inelastis yaitu variabel X_3 karena nilai koefisiennya < 1 .

Dari hasil analisis regresi dengan menggunakan program eviews 9 memunculkan hasil persamaan sebagai berikut :

$$Y = 3.51E+10 + 14213.64 X_1 + 3782.081 X_2 - 1.91E+09 X_3$$

Dari hasil perhitungan regresi seperti pada persamaan tersebut menunjukkan bahwa :

- a. Nilai koefisien dari variabel jumlah wisatawan (X_1) dalam persamaan regresi linear sebesar $14213.64 > 1$ maka bersifat elastis yang berarti bahwa apabila jumlah wisatawan (X_1) mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka akan menaikkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 14.213,64 dan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil

perhitungan regresi seperti ditampilkan dapat dijelaskan bahwa semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta maka pendapatan daerah yang diterima akan semakin meningkat. Sebaliknya jika jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami penurunan maka pendapatan daerah yang diterima akan semakin menurun. Hal ini karena segala kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata sehingga akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil ini didukung dengan hasil penelitian dari Rahman (2018), yang menyatakan bahwa Jumlah Wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Karena semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata, maka semakin banyak pula jasa dan produk-produk di daerah wisata tersebut yang terjual. Dengan begitu pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui pajak maupun retribusi yang diterima.

- b. Nilai koefisien dari variabel pendapatan perkapita (X_2) dalam persamaan regresi linear sebesar $3782.081 > 1$ maka bersifat elastis yang berarti bahwa apabila pendapatan perkapita (X_2) mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka akan menaikkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 3.782,081 dan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil perhitungan regresi seperti pada persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata karena semakin tinggi pendapatan perkapita

masyarakat, semakin besar pula tingkat sosial ekonomi mereka. Orang yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang tinggi, mereka sudah mampu mencukupi kebutuhan minimum mereka. Sehingga kesempatan bagi mereka untuk membiayai perjalanan wisata juga semakin besar. Sehingga semakin besar pendapatan perkapita masyarakat maka semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan sektor pariwisata.

Hasil ini didukung dengan penelitian Rahma dan Handayani (2013), menyatakan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata. Artinya semakin besar pendapatan perkapita maka semakin besar pula penerimaan yang diperoleh dari sektor pariwisata.

- c. Nilai koefisien dari variabel tingkat hunian hotel (X_3) dalam persamaan regresi linear sebesar $-1.91E+09 < 1$ maka bersifat elastis yang berarti bahwa apabila pendapatan perkapita (X_2) mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka akan menurunkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 1.910 dan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil perhitungan regresi seperti pada persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa variabel tingkat hunian hotel tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata karena para wisatawan yang datang ke DIY didominasi oleh wisatawan domestik dimanan jarak antara tempat wisata dan tempat tinggal sangat terjangkau sehingga mereka tidak membutuhkan hotel sebagai tempat untuk menginap.

Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulhadidi Fajri, dkk (2014) yang menyatakan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan Kota Bukittinggi. Hal ini karena banyaknya jumlah hotel melati dan penginapan yang lebih dekat dengan tempat wisata, menyebabkan para wisatawan yang berasal dari luar daerah memilih untuk menginap di hotel melati dengan biaya yang lebih murah daripada harus mencari hotel berbintang dengan harga yang mahal. Sehingga jumlah pajak yang diterima hotel berbintang akan berkurang dan penerimaan pajak hotel melati akan bertambah. Oleh karena itu, pajak yang sebelumnya didominasi oleh hotel berbintang akan beralih pada hotel melati sehingga pajak yang diterima pemerintah daerah tidak sebanding dengan sebelumnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat hunian hotel DIY tidak berpengaruh terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di DIY.

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari ketiga variabel yang dianalisis yaitu jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan tingkat hunian hotel secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai koefisien determinasi R-Square (R^2) sebesar 0.971138 yang berarti bahwa 97,1 persen penerimaan daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu jumlah wisatawan, pendapatan perkapita, dan tingkat hunian hotel. Sedangkan sisanya sebesar 2,9 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak termasuk dalam penelitian.
2. Variabel jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya jika jumlah wisatawan bertambah, maka penerimaan daerah sektor pariwisata akan meningkat.
3. Variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya jika pendapatan perkapita bertambah, maka penerimaan sektor pariwisata akan meningkat. Variabel tingkat Hunian Hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya jika terjadi kenaikan tingkat hunian hotel, maka tidak terjadi kenaikan pada penerimaan daerah sektor pariwisata.

5.2 SARAN

1. Apabila dilihat dari koefisien ketiga variabel tersebut, variabel yang sangat mempengaruhi perubahan penerimaan daerah sektor pariwisata adalah jumlah wisatawan. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah DIY agar lebih meningkatkan fasilitas dan akomodasi industri pariwisata serta dapat membuat event-event yang menarik terkait keanekaragaman alam dan budaya di DIY sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung ke DIY.
2. Dengan kekayaan alam dan keanekaragaman budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah dapat meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dengan menggalakkan industri pariwisata syariah disertai dengan akomodasi yang berbasis syariah juga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sulastiono. Manajemen Penyelenggaraan Hotel. Bandung : Alfabeta. 2011

Ahmad Yani. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. 2009

Aulia Afafun Nisa. 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal ilmu ekonomi. Vol I jilid 2*, 203-214.

Aziz, Samudra Azhari. *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Kota Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Darwin. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2010.

Deddy Prasetya Maha Rani, 2014, Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus : Pantai Lombang), *Jurnal Politik Muda, Volume 3 No. 3, Agustus—Desember 2014*, 412-421.

Femy Nadia Rahma, Herniwati Retno Handayani. 2013. Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus. *Diponegoro journal of economics . vol. 2, No. 2*, 1-9.

Ghozali Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2013.

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syaria.*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2007.

Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. 2004.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/01/1468/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-desember-2017-mencapai-1-15-juta-kunjungan--.html> diakses pada Minggu, 3 Maret 2019 pukul 19.46 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata_di_Indonesia diakses pada Minggu, 3 Maret 2019 pukul 19.50 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/711534/world-halal-travel-award-2015-indonesia-raih-3-penghargaan> diakses pada Minggu, 3 Maret 2019 pukul 20.00 WIB

HM, Muhammad Amir. *Wisata dalam Wawasan Al-Qur'an*. Yogyakarta : Mitra Cendekia Mahameru. 2011.

I Nyoman Sudapet, dkk, 2017, Model Integrasi Ekonomi Maritim Dan Pariwisata Di Daerah Guna Peningkatan Ekonomi Indonesia Timur, *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*. Vol. IX, No. 1, 148-160.

Jajuli, Sulaeman. *Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam (Baitul maal sebagai Basis Pertama dalam Pendapatan Islam)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Suwantoro, Gamal. *Dasar-dasar Pariwisata* Yogyakarta : Andi. 2007.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid* . Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema. 2014

Mamesa. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 1995

Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Andi. 2004

Muhammad Afdi Nizar. 2011. Tourism Effect On Economic Growth In Indonesia. *Munich Personal RePEc Archive*

Nasution, Mustafa Edwin, Budi Setyanto dan Nurul Huda. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana : Jakarta. 2007.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

R. Sihite. *Tourism Industry*. Surabaya. SIC. 2000

Riska Arlina, Evi Yulia Purwanti. 2013. Analisis Penerimaan Daerah Dari Industri Pariwisata Di Provinsi Dki Jakarta Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Diponegoro journal of economics* . vol. 2, No. 3, 1-15

Sari, Diana. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama. 2013

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis Bandung* : Cv. Alfabeta. 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Unit Pengembangan Fakultas Ekonomika Universitas Diponegoro. *Modul Eviews* 6. 2011.

Warsito. *Hukum Pajak*. Jakarta : PT Rajawali Grafindo Persada. 2001.

Widyaningrum. *Pengaruh Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Wisatawan, dan Jumlah Objek Wisatawan terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Kudus Tahun 1981-2011*. Skripsi Dipublikasikan. Semarang : Universitas Negeri Semarang.

LAMPIRAN A
(DATA MENTAH)

N	Y	XI	X2	X3
1	22.033.378.144	3.778.951	4.816.287	37,36
2	27.470.990.807	7.363.821	5.027.492	38,37
3	44.268.424.663	5.064.341	5.057.608	35,92
4	67.521.209.752	2.403.837	5.272.562	34,46
5	56.709.184.190	5.249.738	5.444.868	38,27
6	78.189.082.649	7.212.244	5.662.383	42,70
7	89.910.353.874	9.716.424	5.855.379	42,75
8	95.863.242.777	8.157.393	6.086.507	43,68
9	106.215.569.037	9.342.243	6.345.750	45,34
10	153.174.399.477	11.507.556	6.631.806	46,98
11	188.839.015.344	11.666.232	21.037.428	48,63
12	236.955.587.690	13.943.387	21.867.994	50,27
13	266.933.359.315	19.022.318	22.688.207	51,09
14	353.913.365.540	21.445.343	23.565.753	52,94
15	423.146.610.814	25.950.793	24.534.055	55,68

LAMPIRAN B

DATA VARIABEL PENELITIAN

TAHUN	PENERIMAAN SEKTOR PARIWISATA	JUMLAH WISATAWAN	PENDAPATAN PERKAPITA	TINGKAT HUNIAN HOTEL
2003	22.033.378.144	3.778.951	4.816.287	37,36
2004	27.470.990.807	7.363.821	5.027.492	38,37
2005	44.268.424.663	5.064.341	5.057.608	35,92
2006	67.521.209.752	2.403.837	5.272.562	34,46
2007	56.709.184.190	5.249.738	5.444.868	38,27
2008	78.189.082.649	7.212.244	5.662.383	42,70
2009	89.910.353.874	9.716.424	5.855.379	42,75
2010	95.863.242.777	8.157.393	6.086.507	43,68
2011	106.215.569.037	9.342.243	6.345.750	45,34
2012	153.174.399.477	11.507.556	6.631.806	46,98
2013	188.839.015.344	11.666.232	21.037.428	48,63
2014	236.955.587.690	13.943.387	21.867.994	50,27
2015	266.933.359.315	19.022.318	22.688.207	51,09
2016	353.913.365.540	21.445.343	23.565.753	52,94
2017	423.146.610.814	25.950.793	24.534.055	55,68

LAMPIRAN C

Hasil Output Regresi

Dependent Variable: PENERIMAAN_SEKTOR_PARIWI

Method: Least Squares

Date: 07/12/19 Time: 10:37

Sample: 2003 2017

Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.51E+10	3.91E+10	0.898121	0.3884
JUMLAH_WISATAWAN	14213.64	2064.407	6.885094	0.0000
PENDAPATAN_PERKAPITA	3782.081	1586.255	2.384283	0.0362
TINGKAT_HUNIAN_HOTEL	-1.91E+09	9.46E+08	-2.023557	0.0680
R-squared	0.971138	Mean dependent var	1.47E+11	
Adjusted R-squared	0.963267	S.D. dependent var	1.23E+11	
S.E. of regression	2.35E+10	Akaike info criterion	50.82184	
Sum squared resid	6.08E+21	Schwarz criterion	51.01065	
Log likelihood	-377.1638	Hannan-Quinn criter.	50.81983	
F-statistic	123.3763	Durbin-Watson stat	2.377257	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil Output Multikolonieritas

Variance Inflation Factors

Date: 07/12/19 Time: 10:40

Sample: 2003 2017

Included observations: 15

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.53E+21	41.41661	NA
JUMLAH_WISATAWAN	4261776.	18.40742	4.938182
PENDAPATAN_PERKAPITA	2516206.	13.26427	4.498993
TINGKAT_HUNIAN_HOTEL	8.94E+17	47.83052	1.212487

Hasil Output Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.038688	Prob. F(2,9)	0.3928
Obs*R-squared	2.812999	Prob. Chi-Square(2)	0.2450

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 07/12/19 Time: 10:39

Sample: 2003 2017

Included observations: 15

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.12E+10	5.28E+10	-0.970427	0.3572
JUMLAH_WISATAWAN	-1498.943	2317.710	-0.646734	0.5339
PENDAPATAN_PERKAPITA	1028.366	1742.214	0.590264	0.5695
TINGKAT_HUNIAN_HOTEL	1.25E+09	1.28E+09	0.973131	0.3559
RESID(-1)	-0.517280	0.393719	-1.313829	0.2214
RESID(-2)	-0.474523	0.399326	-1.188310	0.2651
R-squared	0.187533	Mean dependent var		-1.27E-05
Adjusted R-squared	-0.263837	S.D. dependent var		2.08E+10
S.E. of regression	2.34E+10	Akaike info criterion		50.88083
Sum squared resid	4.94E+21	Schwarz criterion		51.16405
Log likelihood	-375.6062	Hannan-Quinn criter.		50.87781
F-statistic	0.415475	Durbin-Watson stat		1.913278
Prob(F-statistic)	0.826901			

Hasil Output Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Harvey

F-statistic	0.208789	Prob. F(3,11)	0.8882
Obs*R-squared	0.808122	Prob. Chi-Square(3)	0.8475
Scaled explained SS	0.373120	Prob. Chi-Square(3)	0.9457

Test Equation:

Dependent Variable: LRESID2

Method: Least Squares

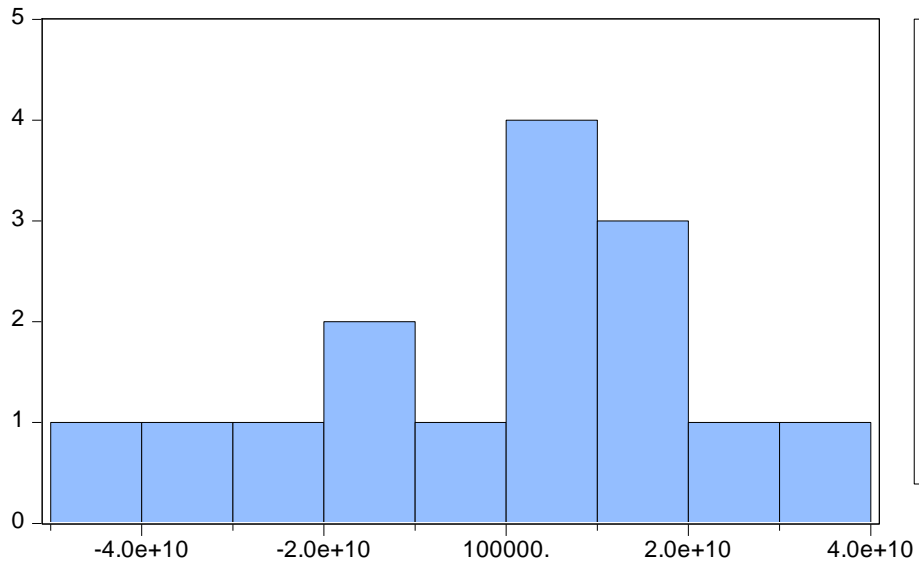
Date: 07/12/19 Time: 10:39

Sample: 2003 2017

Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.20395	2.848956	16.91986	0.0000
JUMLAH_WISATAWAN	6.43E-08	1.51E-07	0.427252	0.6774
PENDAPATAN_PERKAPITA	-6.64E-08	1.16E-07	-0.573541	0.5778
TINGKAT_HUNIAN_HOTEL	-0.037570	0.068994	-0.544537	0.5969
R-squared	0.053875	Mean dependent var		46.50050
Adjusted R-squared	-0.204159	S.D. dependent var		1.562436
S.E. of regression	1.714526	Akaike info criterion		4.139329
Sum squared resid	32.33560	Schwarz criterion		4.328142
Log likelihood	-27.04497	Hannan-Quinn criter.		4.137318
F-statistic	0.208789	Durbin-Watson stat		1.940935
Prob(F-statistic)	0.888203			

Hasil Output Normalitas



Series: Residuals
Sample 2003 2017
Observations 15

Mean -1.27e-05
Median 5.60e+09
Maximum 3.30e+10
Minimum -4.17e+10
Std. Dev. 2.08e+10
Skewness -0.436520
Kurtosis 2.548199

Jarque-Bera 0.603952
Probability 0.739356

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Khodijah
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 4 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dk. Pulo Rt.10/Rw.04, Desa Mojowetan,
Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora
Email : skhodijah228@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2012 – 2015 : SMA N 1 Blora
Tahun 2009 – 2012 : SMP N 3 Blora
Tahun 2006 – 2012 : SDN 2 Mojowetan